



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

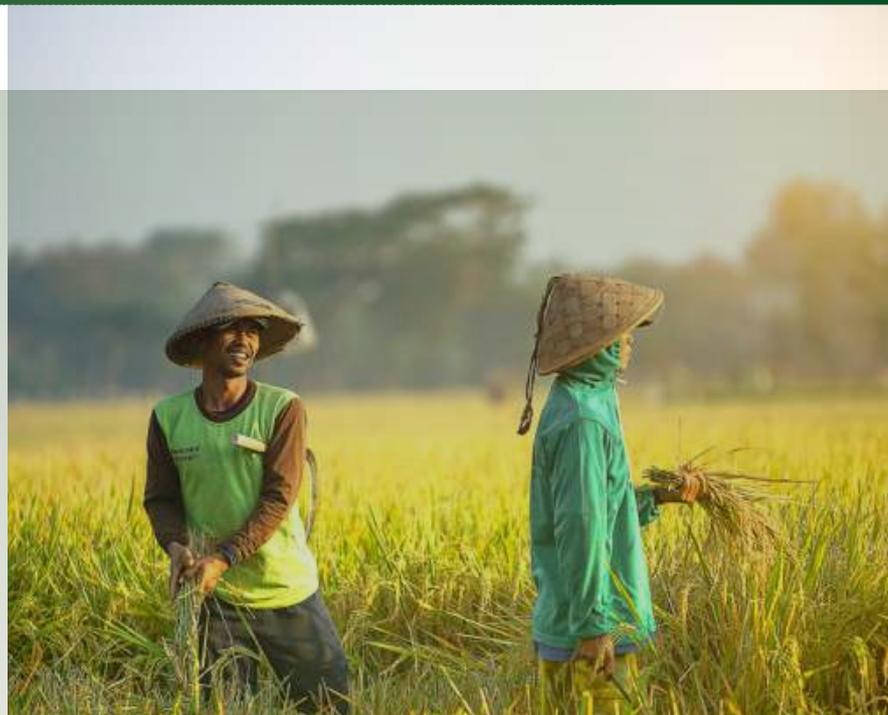


TAHUN
2022

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Disamping itu, Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam rangka pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, 20 Januari 2023
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
NIP. 19701116 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Usaha untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian.

Capaian sasaran diukur melalui indikator produktivitas pertanian dengan target pertumbuhan sebesar **7 ton/ha** yang dihitung berdasarkan total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, produktivitas pertanian yang diukur dari angka pertumbuhan komoditi perkebunan, sayuran, buah, tanaman obat dan tanaman pangan mencapai angka **6.79 ton/ha**, dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang ditentukan. Persentase pencapaian terhadap target mencapai **97%**. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non produktif, alih profesi petani, serta kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas pertanian. Dibandingkan

capaian target produktivitas pertanian tahun 2021 sebesar **6.23 ton/ha**, terjadi peningkatan sebesar **8.99%**.

2. Peningkatan populasi peternakan.

Capaian sasaran diukur melalui indikator populasi peternakan dengan target populasi sebanyak **19.789.207 ekor** yang dihitung melalui penjumlahan ternak yang hidup di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, populasi hewan ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka **15.709.946 ekor** atau sebesar **79.38%** dari target yang ditentukan. Tidak tercapainya target disebabkan terjadinya penambahan kasus penyakit hewan menular pada hewan ternak, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun potong paksa. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah pemasukan hewan ke Provinsi Bangka Belitung akibat pembatasan lalu lintas hewan, Dibandingkan capaian target populasi peternakan tahun 2021 sebanyak **13.210.386 ekor**, terjadi peningkatan sebesar **18.92%**.

3. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.

Capaian sasaran diukur melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan target pencapaian angka **98**. Skor PPH ketersediaan merupakan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat, dan Program Penanganan Kerawanan Pangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pencapaian skor PPH ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 (n-1) adalah sebesar **86.1** dengan persentase realisasi sebesar **87.86%** terhadap pencapaian target. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain menurunnya produksi komoditas pangan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan kondisi cuaca ekstrim dan penurunan produksi. Selain itu, terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Bangka Belitung juga menyebabkan menurunnya distribusi, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di Bangka Belitung yang sangat bergantung dengan impor. Dibandingkan capaian target skor PPH Ketersediaan tahun 2021 sebesar **87,26**, terjadi penurunan sebesar **1.33%**.

4. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

Capaian sasaran diukur melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan target pencapaian angka **98**. Skor PPH konsumsi merupakan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 (n-1) mencapai angka **81,1** atau persentase realisasi sebesar **82.76%** terhadap pencapaian target. Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal yang dianjurkan sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun keseimbangan gizinya. Dalam hal ini, beras masih mendominasi pola konsumsi pangan masyarakat Bangka Belitung sebagai sumber karbohidrat. Disamping itu, konsumsi pangan sayur dan buah,

umbi-umbian, pangan hewani serta kacang-kacangan masyarakat Bangka Belitung masih tergolong rendah. Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2021 sebesar **82,70**, terjadi penurunan sebesar **1.97%**.

5. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

Capaian sasaran diukur melalui indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dengan target angka penilaian sebesar **73,42**. Nilai RB merupakan angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berdasarkan penilaian oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan tim penilai RB Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapatkan predikat “Memuaskan” dengan skor angka penilaian **87,49**. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target yang ditentukan, persentase ketercapaian terhadap target sebesar **119.16%**. Dibandingkan dengan capaian nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021 yaitu **61.51**, terjadi peningkatan sebesar **42.24%**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah antisipasi sebagai tindak lanjut pengendalian dari risiko yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun tantangan yang teridentifikasi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian;
2. Semakin menurunnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
3. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar



- dan permodalan serta perlindungan usahatani
4. Banyaknya petani yang beralih profesi menjadi penambang sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan;
 5. Dampak perubahan iklim global dan perubahan pola intensitas curah hujan yang menyebabkan cuaca ekstrim;
 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan beragam;
 7. Kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.3. Isu-isu Strategis	17
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	18
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	25
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	27
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	32
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	35
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	35
3.1.1 Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian.	38
3.1.2 Sasaran : Peningkatan populasi peternakan.	44
3.1.3 Sasaran : Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.	49
3.1.4 Sasaran : Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.	55
3.1.5. Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah.	60
3.2. Efisiensi Anggaran	66
3.3. Inovasi	68
3.4. Penghargaan	69
BAB IV. Penutup	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	19
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	22
Tabel I.3.	Perbandingan Anggaran Tahun 2021-2022	23
Tabel I.4.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021	24
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017-2022	26
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	26
Tabel II.3.	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	27
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022	33
Tabel III.1.	Skala Nilai Perangakat Kinerja	35
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2022	36
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)	38
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1)	38
Tabel III.5.	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1)	41
Tabel III.6.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)	44
Tabel III.7.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2)	45
Tabel III.8.	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2)	46
Tabel III.9.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)	49
Tabel III.10.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3)	50
Tabel III.11.	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3) ..	52

Tabel III.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	55
Tabel III.13.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4).....	56
Tabel III.14.	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4) ..	57
Tabel III.15.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 5)	61
Tabel III.16.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 5).....	62
Tabel III.17	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 5) ...	63
Tabel III.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ... 2
- Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 17
- Gambar III.1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 1) 42
- Gambar III.2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 2) 47
- Gambar III.3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 3) 52
- Gambar III.4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 4) 58
- Gambar III.5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 5) 64



BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

BAB I Berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP*

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

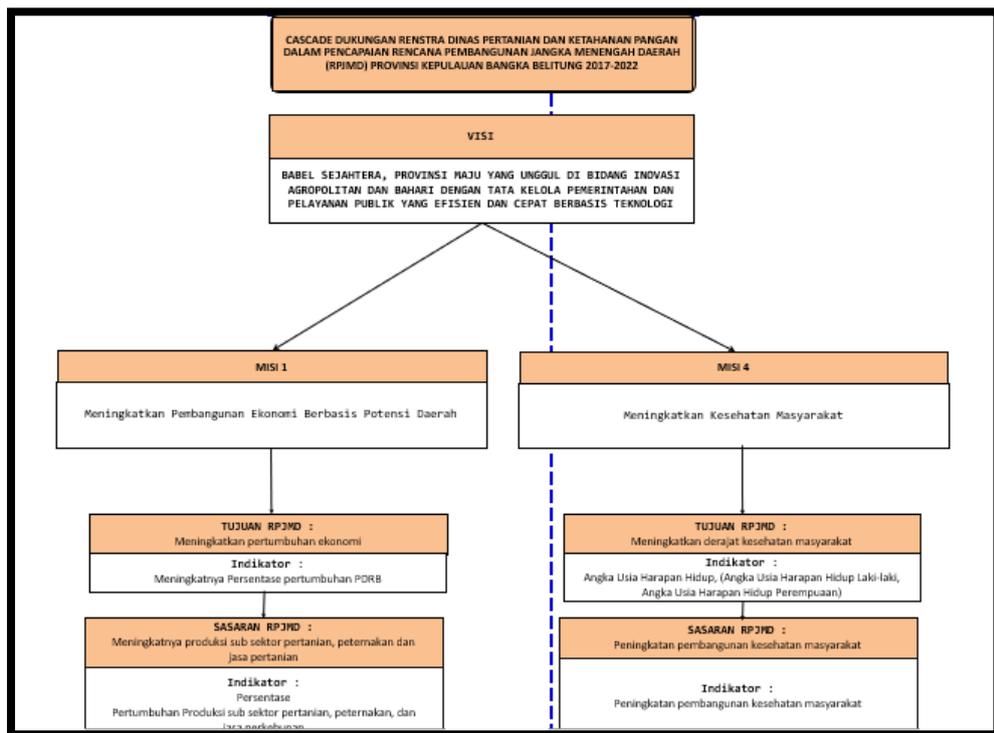
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1
Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

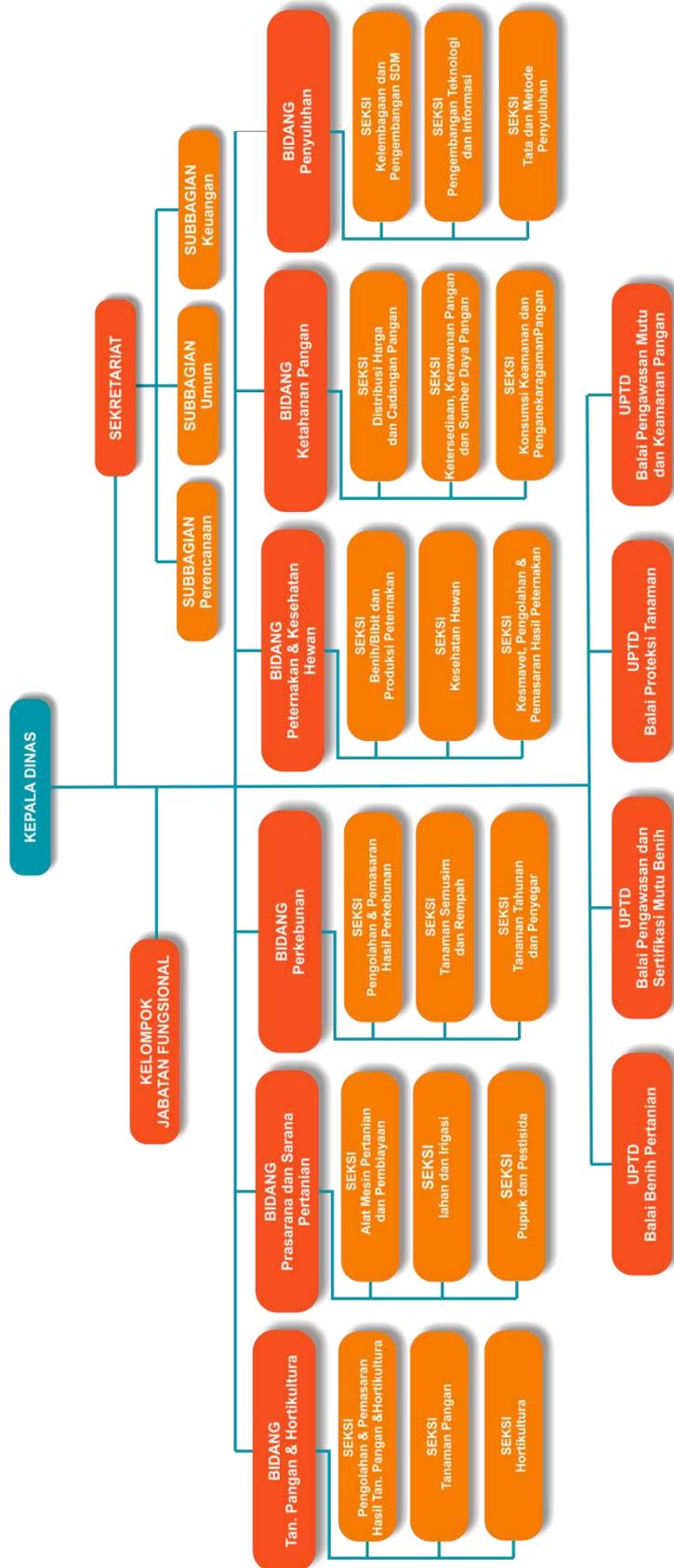


Ket: Cascading Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/CascadeDPKP



Ket: Peta Proses Bisnis Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/ProbisDPKP

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



1.2. Tugas dan Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai

dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTD;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian dan bidang pangan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah Kabupaten/Kota;

- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha perkebunan lintas daerah Kabupaten/Kota;

- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil perternakan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin

- pertanian;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan tata dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- f. Pengoordinasian Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- g. Penyelenggaraan verifikasi konsep hasil kajian penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;

- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantauan, pemantapan distribusi pangan, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

- kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - q. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - s. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - t. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. UPTD Balai Benih Pertanian

Balai Benih Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyak benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;

- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

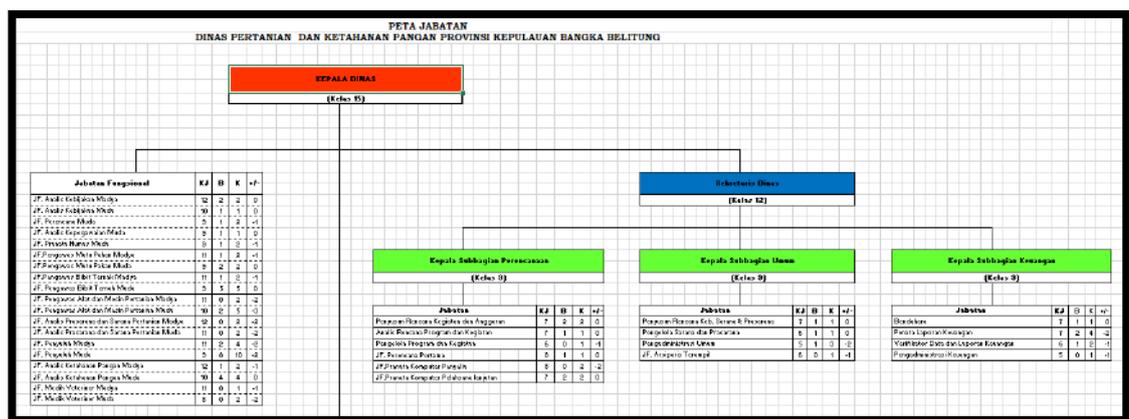
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ket: Peta Proses Bisnis Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/PetaJabatanDPKP

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Pembangunan pertanian

dan ketahanan pangan”, antara lain sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai perangkat dinas, dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMP UAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
-	TOTAL PEGAWAI NEGERI SIPIL	206	32	139	16	20	192	32	125	17	18	120	72
-	TOTAL PHL / PTK	139	1	55	13	70	139	1	55	13	70	80	59
A	JABATAN STRUKUTRAL	45	12	33	0	0	44	15	28	1	0	31	13
1	Pejabat ESELON II	1	1				1	1				1	
2	Pejabat ESELON III	11	11				11	6	5			9	2
3	Pejabat ESELON IV / Sub Koordinator	33		33			32	8	23	1		21	11
B	JABATAN FUNGSIONAL	97	17	67	10	3	89	14	60	12	3	54	35
1	Analisis Kebijakan	3	2	1			3	2	1			1	2
2	Analisis Kepegawaian	1		1			1		1			1	
3	Perencana	2	1	1			2	1	1			2	
4	Pranata Humas	2		2			1		1			1	
5	Pranata Komputer	2		1	1		2		1	1		2	
6	Penyuluh Pertanian	23	3	16	1	3	19	1	14	1	3	12	7
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	14	2	11	1		13	2	10	1		7	6
8	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2		2			2		2			1	1
9	Pengawas Benih Tanaman	8	2	4	2		8	2	4	2		5	3
10	Pengawas Bibit Ternak	14	1	11	2		14	1	11	2		10	4
11	Medik Veteriner	3	1	2			3	1	2			2	1
12	Parameter Medik	3			3		3			3		1	2
13	Pengawas Mutu Pakan	9	2	7			8	2	6			4	4

14	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	4		4			4		4			3	1
15	Analisis Ketahanan Pangan	7	3	4			6	2	4			2	4
C	JABATAN PELAKSANA	64	3	38	6	17	59	3	35	6	15	35	24
1	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1		1			1		1			1	
2	Analisis Data dan Informasi	4		4			4		4			1	3
3	Analisis Pangan	6		6			6		6			1	5
4	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1		1			1		1			1	
5	Analisis Pembiayaan Pertanian	1		1			1		1			1	
6	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	3	1	2			3	1	2			1	2
7	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
8	Analisis Program dan Pembangunan	1	1				1	1					1
9	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1		1			1		1			1	
10	Analisis Tata Usaha	2		2			2		2			2	
11	Analisis Data dan Informasi	2		2			2		2				2
12	Bendahara	1		1			1		1				1
13	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	1		1			1		1			1	
14	Penata Laporan Keuangan	6		6			4		4			1	3
15	Pengadministrasi Umum	15				15	13				13	12	1
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	1		1			1		1			1	
17	Pengawas Lalulintas Hewan dan Wilayah Karantina	1		1			1		1				1
18	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1		1			1		1				1
19	Pengawas Pupuk dan Peptisida	1		1			1		1			1	
20	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1			1		1			1		1	
21	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1		1			1			1

22	Pengelola Lahan Pertanian	1			1		1			1		1	
23	Pengelola Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1		1			1		1			1	
24	Pengelola Surat	1			1		1			1		1	
25	Pengelola Teknologi Perbenihan	1			1		1			1		1	
26	Pengujicoba Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	1				1	1				1	
27	Pengujicoba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	1		1			1		1				1
28	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1		1			1		1			1	
29	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan dan Perkebunan	1			1		1			1			1
30	Teknisi Instalasi Budidaya	2				2	2				2	2	
31	Verifikator Keuangan	2		2			1		1			1	
D	PHL / PTK	139	1	55	13	70	139	1	55	13	70	80	59

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 180 orang (54,38%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 30 orang (9,06%), D3 sebanyak 32 orang (9,67%), SLTA sebanyak 78 orang (23,56%), dan SLTP sebanyak 10 orang (3,02%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2.
Sarana-Prasarana

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	TANAH	1.053.355 M²
2	PERALATAN DAN MESIN	2.439 Unit
	a. Alat-alat Besar	22 Unit
	b. Alat-alat Angkutan	71 Unit
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	91 Unit
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	77 Unit
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.552 Unit
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	158 Unit
	g. Alat-alat Kedokteran	69 Unit
	h. Alat-alat Laboratorium	396 Unit
	i. Alat-alat Keamanan	3 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	58 Unit
	a. Bangunan Gedung	55 Unit
	b. Bangunan Monumen	3 Unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	25 Unit
	a. Jalan dan Jembatan	7 Unit
	b. Bangunan Air/Irigasi	6 Unit
	c. Instalasi	8 Unit
	d. Jaringan	4 Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	11.483 Buah
	a. Buku Perpustakaan	234 Buah
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	- Buah
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	11.249 Buah
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1 Unit

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Kendaraan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 2 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II, 12 unit kendaraan operasional jabatan Eselon III, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadamkebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personalkomputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 50% Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 70% dari komputer/laptop yang ada diproduksi dibawah tahun 2015 yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2021	Rp50,327,482,094	Rp2,226,296,638	-	-	Rp52,553,778,732
2022	Rp55,632,613,802	Rp1,181,804,239	-	-	Rp56,814,418,041

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 4.260.639.309,- Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/121/LHE/INTPD/2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring pencapaian target dalam rencana aksi secara periodik; 2. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; 3. Melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV; 4. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; 5. Memanfaatkan informasi yang disajikan untuk perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja; 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja; 7. Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan periodik minimal triwulanan dan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang; 8. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. 	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2. Penggunaan aplikasi bit/ly dalam penginputan laporan monitoring dan evaluasi; 3. Monitoring pencapaian target kinerja Eselon III dan IV disampaikan melalui Laporan Dalev (Pengendalian dan Evaluasi) per Triwulan; 4. Pemberian piagam penghargaan dari kepala dinas kepada eselon yang meraih capaian kinerja yang paling baik pada tahun anggaran tersebut dan peringatan secara tertulis dari kepala dinas kepada eselon yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; 5. Menyajikan tabel informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 6. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rapat penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah; 7. Kepala dinas melakukan pengawasan internal serta penilaian secara berkala terhadap seluruh jajarannya dalam rangka pengendalian kinerja; 8. Penyusunan Dokumen Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian oleh setiap PPK/PPTK berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka peningkatan capaian kinerja.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran operasional RPJMD tahun 2017-2022 yang telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2017 sampai dengan 2022.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra	Ket
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	5	5	6	6	7	7	7	-
2.	Peningkatan populasi peternakan	Populasi Peternakan	Ekor	9.777.464	11.661.566	13.001.547	14.955.680	17.203.518	19.789.207	19.789.207	-
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87,84	98	98	98	98	98	98	-
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	81.2	98	98	98	98	98	98	-
5.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai	-	73.34	73.36	73.38	73.40	73.42	73.42	-

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2017-2022

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Produksi Pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
		Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

		Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Meningkatkan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian
	Peningkatan populasi peternakan	Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian	Meningkatkan pertambahan angka populasi ternak
		Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Menurunkan kasus penyakit hewan menular
	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
		Melakukan penanganan kerawanan pangan	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	Meningkatkan konsumsi pangan B2SA
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakin PD (DPKP)

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
TOTAL ANGGARAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN SASARAN							Rp36,196,795,943	Rp56,814,418,041	Rp20,617,622,098
1. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)	Rp32,622,171,653	Rp35,930,079,551	Rp3,307,907,898
	2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp189,225,941	Rp239,494,065	Rp50,268,124
	2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp96,124,529	Rp113,115,133	Rp16,990,604
	2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp93,101,412	Rp126,378,932	Rp33,277,520
	2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp25,084,956,119	Rp28,103,976,680	Rp3,019,020,561

2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp25,068,861,218	Rp28,069,476,902	Rp3,000,615,684
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp14,179,901	Rp29,049,951	Rp14,870,050
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp1,915,000	Rp5,449,827	Rp3,534,827
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp48,694,000	Rp48,694,000	Rp-
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp30,000,000	Rp30,000,000	Rp-
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp18,694,000	Rp18,694,000	Rp-
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp679,272,368	Rp1,059,291,581	Rp380,019,213
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp79,999,465	Rp59,999,278	-Rp20,000,187
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp19,091,275	Rp179,783,075	Rp160,691,800
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp79,999,715	Rp79,999,715	Rp-
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp31,000,000	Rp44,773,600	Rp13,773,600
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp-
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp89,999,913	Rp89,999,913	Rp-
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp-
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp309,182,000	Rp534,736,000	Rp225,554,000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5,842,899,225	Rp5,564,499,225	-Rp278,400,000
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp-
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp235,899,225	Rp235,899,225	Rp-
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp5,597,000,000	Rp5,318,600,000	-Rp278,400,000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp777,124,000	Rp914,124,000	Rp137,000,000
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp506,904,000	Rp529,904,000	Rp23,000,000
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp70,220,000	Rp90,220,000	Rp20,000,000
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200,000,000	Rp294,000,000	Rp94,000,000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN)	Rp148,242,003	Rp158,241,753	Rp9,999,750
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp50,892,003	Rp69,639,753	Rp18,747,750
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,997,474	Rp4,997,474	Rp0
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2,998,659	Rp2,998,659	Rp0
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp7,704,710	Rp7,704,710	Rp0
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2,936,133	Rp2,936,133	Rp0
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp10,646,027	Rp10,646,027	Rp0
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp2,975,000	Rp2,975,000	Rp0
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp18,634,000	Rp37,381,750	Rp18,747,750
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp91,500,000	Rp82,752,000	-Rp8,748,000
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1,500,000	Rp1,500,000	Rp0

2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp90,000,000	Rp81,252,000	-Rp8,748,000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5,850,000	Rp5,850,000	Rp-
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp5,850,000	Rp5,850,000	Rp0
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BALAI BENIH PERTANIAN)	Rp275,151,375	Rp230,147,865	-Rp45,003,510
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp91,495,875	Rp46,492,365	-Rp45,003,510
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1,500,000	Rp1,500,000	Rp-
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp89,995,875	Rp44,992,365	-Rp45,003,510
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp183,655,500	Rp183,655,500	Rp-
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp178,765,500	Rp178,765,500	Rp-
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp4,890,000	Rp4,890,000	Rp-
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp53,760,965	Rp98,731,965	Rp44,971,000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,988,952	Rp4,988,952	Rp-
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2,999,380	Rp2,999,380	Rp-
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp7,703,358	Rp7,703,358	Rp-
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4,524,800	Rp4,524,800	Rp-
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp9,567,475	Rp9,567,475	Rp-
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp-
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp20,977,000	Rp65,948,000	Rp44,971,000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSMB)	Rp119,086,299	Rp119,086,299	Rp-
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp51,586,299	Rp51,586,299	Rp-
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,998,986	Rp4,998,986	Rp-
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp-
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp7,705,644	Rp7,705,644	Rp-
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3,322,692	Rp3,322,692	Rp-
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp10,492,977	Rp10,492,977	Rp-
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp-
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp19,066,000	Rp19,066,000	Rp-
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp61,500,000	Rp61,500,000	Rp-
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1,500,000	Rp1,500,000	Rp-
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp-
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6,000,000	Rp6,000,000	Rp-
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6,000,000	Rp6,000,000	Rp-
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PMKP)	Rp45,253,526	Rp45,151,312	-Rp102,214
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp42,563,526	Rp43,666,312	Rp1,102,786

	2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,998,033	Rp4,977,819	-Rp20,214	
	2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2,379,523	Rp2,379,523	Rp-	
	2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp5,267,091	Rp5,267,091	Rp-	
	2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2,924,442	Rp2,924,442	Rp-	
	2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rp10,208,437	Rp10,208,437	Rp-	
	2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp-	
	2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp13,786,000	Rp14,909,000	Rp1,123,000	
	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2,690,000	Rp1,485,000	-Rp1,205,000	
	2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1,490,000	Rp1,485,000	-Rp5,000	
2. Meningkatkan Ketersediaan pangan yang beragam	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp92,470,113	Rp92,466,298	-Rp3,815	
	2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Rp92,470,113	Rp92,466,298	-Rp3,815	
	2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rp68,905,779	Rp68,904,753	-Rp1,026	
	2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rp23,564,334	Rp23,561,545	-Rp2,789	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp272,962,163	Rp372,961,669	Rp99,999,506	
	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp124,759,825	Rp224,759,381	Rp99,999,556	
	2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp25,108,308	Rp25,108,308	Rp-	
	2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp75,996,760	Rp75,996,616	-Rp144	
	2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp23,654,757	Rp123,654,457	Rp99,999,700	
	2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Rp148,202,338	Rp148,202,288	-Rp50	
	2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Rp19,102,338	Rp19,102,288	-Rp50	
	2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp129,100,000	Rp129,100,000	Rp-	
	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp56,891,689	Rp56,891,689	Rp-	
	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rp56,891,689	Rp56,891,689	Rp-	
	3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp77,126,854	Rp77,126,854	Rp-
		2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rp77,126,854	Rp77,126,854	Rp-
2		09	03	1.04	01	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp60,211,498	Rp60,211,498	Rp-	

	2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp16,915,356	Rp16,915,356	Rp-
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp160,591,591	Rp180,591,497	Rp19,999,906
	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp160,591,591	Rp180,591,497	Rp19,999,906
	2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp64,440,421	Rp84,440,327	Rp19,999,906
	2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp28,278,669	Rp28,278,669	Rp-
	2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp67,872,501	Rp67,872,501	Rp-
4. Peningkatan produktivitas pertanian	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp101,530,510	Rp5,426,032,372	Rp5,324,501,862
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp46,905,188	Rp3,371,405,158	Rp3,324,499,970
	3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp46,905,188	Rp3,371,405,158	Rp3,324,499,970
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp54,625,322	Rp2,054,627,214	Rp2,000,001,892
	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Rp54,625,322	Rp2,054,627,214	Rp2,000,001,892
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp387,733,983	Rp886,158,833	Rp498,424,850
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Rp387,733,983	Rp886,158,833	Rp498,424,850
	3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Rp387,733,983	Rp886,158,833	Rp498,424,850
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp150,928,032	Rp250,926,032	Rp99,998,000
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp150,928,032	Rp250,926,032	Rp99,998,000
	3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp46,296,678	Rp46,296,678	Rp-
	3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp34,755,432	Rp34,755,432	Rp-
	3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp69,875,922	Rp169,873,922	Rp99,998,000
	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp19,999,973	Rp39,999,723	Rp19,999,750
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp19,999,973	Rp39,999,723	Rp19,999,750
	3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp19,999,973	Rp39,999,723	Rp19,999,750
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp600,017,145	Rp700,017,145	Rp100,000,000
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rp133,256,527	Rp133,256,527	Rp-
	3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Rp133,256,527	Rp133,256,527	Rp-
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp466,760,618	Rp566,760,618	Rp100,000,000
	3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp390,596,228	Rp490,596,228	Rp100,000,000
	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp76,164,390	Rp76,164,390	Rp-

	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD PSMB)	Rp62,172,534	Rp62,172,534	Rp-
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp62,172,534	Rp62,172,534	Rp-
	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp10,183,100	Rp10,183,100	Rp-
	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Rp19,889,769	Rp19,889,769	Rp-
	3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Rp19,226,924	Rp19,226,924	Rp-
	3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Rp12,872,741	Rp12,872,741	Rp-
5. Peningkatan populasi peternakan	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp261,319,985	Rp11,298,283,985	Rp11,036,964,000
	3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp261,319,985	Rp11,298,283,985	Rp11,036,964,000
	3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp261,319,985	Rp11,298,283,985	Rp11,036,964,000
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp219,741,450	Rp219,741,450	Rp-
	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp125,713,651	Rp125,713,651	Rp-
	3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp125,713,651	Rp125,713,651	Rp-
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Rp94,027,799	Rp94,027,799	Rp-
	3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Rp94,027,799	Rp94,027,799	Rp-
	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp469,644,100	Rp569,609,215	Rp99,965,115
	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp469,644,100	Rp569,609,215	Rp99,965,115
	3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp469,644,100	Rp569,609,215	Rp99,965,115
TOTAL ANGGARAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN SASARAN							Rp36,196,795,943	Rp56,814,418,041	Rp20,617,622,098

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula Perhitungan Target
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Ton/Ha	7	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan populasi peternakan	Populasi peternakan	Ekor	19.789.207	Jumlah ternak yang hidup pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	98	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman ketersediaan pangan di masyarakat
4.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	98	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat

5.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai	73.42	Nilai yang didapatkan DPKP sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
----	---	----------------------------------	-------	-------	--

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022, tidak ada perubahan pada indikator dan target kinerja. Hanya ada penambahan anggaran sebesar Rp 20.617.622.098,- yang terdiri dari Rp 4.261.090.206,- APBD Murni dan Rp 16.356.531.892,- Dana Insentif Daerah (DID).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.	Ton/Ha	5	6,23	7	6,79	97%	Sangat Baik	7
2	Peningkatan populasi peternakan.	Indikator: Populasi Peternakan Formula Perhitungan: Penjumlahan ternak yang hidup di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode waktu 1 (satu) tahun.	Ekor	9.777.464	13.210.386	19.789.207	15.709.946	79.38%	Tinggi	19.789.207
3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Formula Perhitungan: Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).	Skor	87,84	87,26	98	86.1	87.86%	Tinggi	98

4	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	<p>Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</p> <p>Formula Perhitungan: Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).</p>	Skor	82,70	81,1	98	81,1	82.76%	Tinggi	98
5	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	Nilai	-	61,51	73,42	87,49	119.16%	Sangat Baik	73,42

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian.

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan indikator produktivitas pertanian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 6.79 Ton/ha atau sebesar 97% dari target 7 Ton/ha. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2022 terhadap sasaran peningkatan produktivitas pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produktivitas pertanian	6,23	7	6.79	97%	7	97%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran produktivitas pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 6.79 Ton/ha, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 97 % (belum melampaui).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 6.23 Ton/ha, terhadap target tahun lalu sebesar 7 Ton/ha terdapat peningkatan sebesar 9%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. formula perhitungan indikator ini adalah Perbandingan pengawasan peredaran pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.
 - b. Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam tahun berjalan dengan tahun akhir RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah rataan dari perbandingan luas tanam tahun berjalan dengan target luas tanam tahun akhir RPJMD dari masing-masing komoditas $\sum \left[\frac{((\text{luas tanam tahun berjalan})/(\text{target luas tanam akhir RPJMD})) \times 100\%}{83,32\%} \right] = 85,7\%$ dari target 83,32% atau sebesar 102,86%.
 - c. Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat. formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat dibagi jumlah benih total. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $561.052/10.000.000 \times$

100%=5,6% dari target 5% atau sebesar 112%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator:
 - a. Rasio Ketersediaan Prasarana Pra Panen Pertanian. Formulasi perhitungan indikator ini adalah Kebutuhan prasarana pertanian (75) dibagi ketersediaan pra panen (5) x 100 = capaian kinerja sebesar 15% dari target tahun 2022 sebesar 15% atau sebesar 100%;
 - b. Rasio Ketersediaan Prasarana Pasca Panen Pertanian. Formulasi perhitungan indikator ini adalah Kebutuhan prasarana pertanian (10) dibagi ketersediaan pasca panen (2) x 100 = capaian kinerja sebesar 5% dari target tahun 2022 yaitu 5% atau sebesar 100%.
3. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program meningkatnya jumlah usaha pertanian yang memiliki izin usaha, mempunyai Indikator dokumen perizinan usaha pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah penjumlahan dokumen rekomendasi perizinan usaha pertanian. Capaian indikator kinerja pada tahun 2022 adalah satu dokumen dengan capaian 100% terhadap target tahun 2022 yaitu satu dokumen.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan sasaran program terkendali dan tertanggulangnya bencana pertanian. Mempunyai Indikator:
 - a. Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) formula perhitungan indicator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian indicator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 1 dokumen.
 - b. Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). formula perhitungan indikator ini

adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 1 dokumen.

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program meningkatnya kualitas penyuluh pertanian. Mempunyai indikator Persentase peningkatan kelas kelompok tani. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kelompok tani yang kualifikasi kelasnya meningkat dibagi jumlah kelompok tani x 100.

$$\frac{\Sigma \text{poktan yang naik kelas tahun ke } n - \Sigma \text{poktan yang naik kelas tahun } n - 1}{\Sigma \text{poktan yang naik kelas tahun ke } n} \times 100\% = \frac{(54 - 30)}{30} \times 100\% = 80\%$$

Capaian kinerja pada indikator ini adalah 80% atau 100% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 yang sebesar 80%.

Tabel III.5
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 1)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. ((Produktivitas perkebunan (1,37) + produktivitas tanaman pangan (9.86) + produktivitas hortikultura (9.14) dibagi 3 = 6.79 Ton/ha.	7 Ton/ha	6.79 Ton/ha	97%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Gambar III.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 1)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Panen bersama tanaman pangan (jagung manis).</p>
2.		<p>Penyerahan delapan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani.</p>
3.		<p>Peresmian Outlet Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>

4.		<p style="text-align: center;">Bimbingan Teknis Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Padi Jajar Legowo.</p>
----	---	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya bibit tanaman berlabel dan bersertifikat;
- c. Meningkatnya luas tanam hortikultura komoditas cabai kecil karena tingginya harga cabai;
- d. Adanya kegiatan yang mendukung penanganan Organisme Pengganggu Tanaman seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- e. Adanya teknologi pengendalian OPT berupa PGPR, *Trichoderma, sp.*, Pestisida Nabati, dan *MS Paenibacillus*;
- f. Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- g. Adanya fasilitasi pembiayaan melalui KUR untuk meningkatkan permodalan kelompok tani;
- h. Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- i. Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan pada awal tahun 2022, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;
- b. Rendahnya kesadaran SDM (petani) terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya;
- c. Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi;
- d. Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- e. Kurangnya kesadaran petani untuk mengasuransikan usahanya.
- f. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang;
- g. Cuaca ekstrim sehingga produksi pertanian menurun.

3.1.2. Sasaran : Peningkatan populasi peternakan.

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan indikator populasi peternakan yaitu penjumlahan ternak yang hidup diwilayah Bangka Belitung dalam periode 1 (satu) tahun. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan populasi peternakan.	Populasi Peternakan	Penjumlahan ternak yang hidup di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Penjumlahan ternak yang hidup di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja sasaran ini adalah 15.709.946 ekor atau sebesar 79.38% dari target 19.789.207 ekor. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran peningkatan populasi peternakan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Populasi peternakan	13.210.386	19.789.207	15.709.946	79.38%	19.789.207	79.38%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan populasi peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 15.709.946 ekor, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 79.38% (belum melampaui).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 13.210.386 ekor, terhadap target tahun lalu yaitu 17.203.518 ekor terdapat peningkatan sebesar 2.59%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana

pertanian, mempunyai Indikator: Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak. Formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka kelahiran ternak tahun berjalan dibandingkan dengan awal RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(13.603.290-9.830.662)/9.830.662 \times 100\%=38,37\%$ dari target 43,41% atau sebesar 88,39%.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai indikator Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(\frac{161-755}{755}) \times 100\% = -78,68\%$ dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 32 %.

Tabel III.8
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
(Sasaran 2)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator: Populasi Peternakan Formula Perhitungan: Penjumlahan ternak yang hidup di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Sapi (20.086) + Ayam Buras (1.128.115) + Ayam Pedaging (14.193.127) + Ayam Peternak (368.618) = 15.709.946 ekor.	19.789.207	15.709.946	79.38%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Gambar III.2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 2)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>monitoring dan pembinaan kelompok peternak</p>
2.		<p>Pengawasan Keamanan Produk Asal Hewan</p>
3.		<p>Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>

4.		<p>Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi fasilitator dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)</p>
----	---	---

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. Dukungan anggaran yang memadai, baik melalui APBD maupun APBN, maupun Dana Insentif Daerah (DID);
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- f. Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku;
- g. Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan pada awal tahun 2022, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;

- b. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- c. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di Minggu ke IV bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- d. Terjadinya kondisi cuaca ekstrim di Bangka Belitung yang berdampak negatif terhadap kesehatan ternak;
- e. Terjadinya wabah menular kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi dan kambing di Bangka Belitung;
- f. Kurangnya kesadaran peternak untuk mengasuransikan usaha ternaknya.

3.1.3. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.

Kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (PPH) Ketersediaan yaitu Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Kinerja sasaran peningkatan Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan menggunakan formulasi

pengolahan data sumbangan energi kelompok pangan Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan DEPTAN tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data Susenas diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH ketersediaan sebesar 86.1 dengan persentase realisasi sebesar 87.86% terhadap target tahun 2022 yaitu 98. Dibandingkan capaian target skor PPH Ketersediaan tahun 2021 sebesar 87,26, terjadi penurunan sebesar 1.33%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	skor PPH ketersediaan	87.26	98	86.1	87.86%	98	86.1%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam adalah sebagai berikut:

- d. Tercapai skor PPH Ketersediaan sebesar 86.1, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 87.86% (belum melampaui).
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 87.26, terhadap target tahun lalu yaitu 98 terdapat penurunan sebesar 1.18%.
- f. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan sasaran terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Indikator Program ini adalah persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras). Formula perhitungan indikator ini adalah produksi beras lokal dibagi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Capaian indikator kinerja adalah $((164,94-143,84))/143,84 \times 100\%=15\%$ dari target sebesar 18%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini sama dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 yang sebesar 15%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mempunyai sasaran meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Formula perhitungan indikator ini adalah pengolahan data skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dari a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Capaian indikator kinerja adalah a) 1,4; b) 3; c) 20,4 dari target sebesar a) 2; b) 4; c) 21,8.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang mempunyai sasaran tertanganinya kerawanan pangan dengan indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun akhir renstra. Capaian indikator kinerja adalah $((9-19))/19 \times 100\%=52,63\%$ dari target sebesar 15%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 17%.

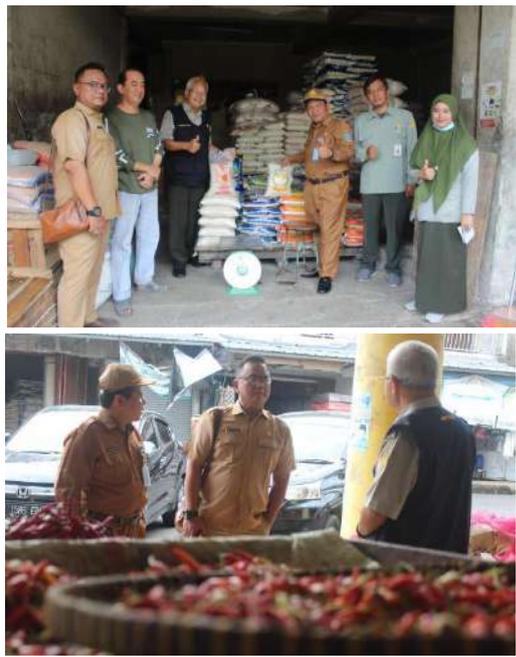
Tabel III.11
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
(Sasaran 3)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Skor PPH Ketersediaan</p> <p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Selanjutnya, Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH ketersediaan sebesar 86.1</p>	98	86.1	87.86%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Gambar III.3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 3)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Rapat koordinasi bersama PERUM BULOG dalam rangka penyediaan dan penyaluran pangan pokok (beras)</p>

2.		<p>Monitoring Ketersediaan Bahan Pangan Pokok</p>
3.		<p>Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok dan Strategis</p>
4.		<p>Survei pasar dalam rangka penguatan ketersediaan pangan untuk mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah dan menekan angka inflasi</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan

- Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
 - e. Tingginya minat petani untuk melakukan usaha budidaya pangan pokok (padi);
 - f. Menurunnya tingkat angka kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung yang berimbas kepada tingginya kemampuan masyarakat dalam akses pangan.
 - h. Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/pelaku usaha pertanian untuk menyediakan bahan pangan pokok.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan pada awal tahun 2022, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;
- b. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- c. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di Minggu ke IV bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- d. Terjadinya kondisi cuaca ekstrim di Bangka Belitung yang berdampak penurunan produksi dan proses distribusi pangan;
- e. Terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Bangka Belitung sehingga menyebabkan menurunnya distribusi pangan pokok dan mempengaruhi ketersediaan pangan.

3.1.4. Sasaran : Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

Kinerja sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (PPH) Komsumsi yaitu Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman komsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).

Sumber : Subkooor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Kinerja sasaran peningkatan Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan menggunakan formulasi pengolahan data sumbangan energi kelompok pangan Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan DEPTAN tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data Susenas diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH Konsumsi sebesar 81.1 dengan persentase realisasi sebesar 82.76% terhadap target tahun 2022 yaitu 98. Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2021 sebesar 82.7, terjadi penurunan sebesar 1.97%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap

sasaran Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.13
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	skor PPH konsumsi	82.7	98	81.1	82.76%	98	82.76%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam adalah sebagai berikut:

- a) Tercapai skor PPH Konsumsi sebesar 81.1, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 82.76% (belum melampaui).
- b) Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 82.7, terhadap target tahun lalu yaitu 98 terdapat penurunan sebesar 1.63%.
- c) Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mempunyai sasaran meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Formula perhitungan indikator ini adalah pengolahan data skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dari a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur. Capaian indikator kinerja adalah a) 1,4; b) 3; c) 20,4 dari target sebesar a) 2; b) 4; c) 21,8.

2. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang mempunyai sasaran terawasinya keamanan pangan. Indikator pada Program ini adalah persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah pangan aman konsumsi dibagi jumlah sampel dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $((83,3+100+88,46))/3 \times 100\% = 90,6\%$ dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi 100,67% dari target yang ditetapkan.

Tabel III.14
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
(Sasaran 4)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Skor PPH Konsumsi</p> <p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Selanjutnya, Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi sebesar 86.1</p>	98	81.1	82.76%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Gambar III.4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 4)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Rapat koordinasi dalam rangka memfasilitasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah mendapatkan Sertifikat Prima 3 masuk ke pasar modern</p>
2.		<p>Bimbingan Teknis Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK)</p>
3.		<p>Kegiatan Pengembangan Dapur Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</p>

4.		<p style="text-align: center;">Gerakan Promosi Diversifikasi Pangan Lokal</p>
----	---	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- d) Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- d. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- g. Tingginya minat petani untuk melakukan usaha budidaya pangan pokok (padi);
- h. Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/ pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya sehingga produk pertanian yang dihasilkan bersertifikat prima;
- i. Gencarnya promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

- j. Menurunnya tingkat angka kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung yang berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat terhadap konsumsi pangan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan pada awal tahun 2022, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;
- b. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- f. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di Minggu ke IV bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan;
- h. Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi.

3.1.5. Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai good governance. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 5)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber : Subkooor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formulasi penjumlahan nilai komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat Nomor 700/103/INPTD tentang Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh Bobot nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 31.76 dengan predikat nilai “A” yang apabila dikonversikan dengan bobot penilaian maksimal sebesar 36.30 maka didapatkan nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 87.49 dengan persentase realisasi sebesar 119.16% terhadap target tahun 2022 yaitu 73.42. Dibandingkan dengan capaian nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021 yaitu 61.51, terjadi peningkatan sebesar 42.24%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.16
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 5)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai RB perangkat daerah (DPKP)	61.51	73.42	87.49	119.16%	73.42	119.16%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) adalah sebagai berikut:

- a) Tercapai nilai RB perangkat daerah (DPKP) sebesar 87.49, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 119.16% (melampaui).
- b) Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 61.51, terhadap target tahun lalu yaitu 73.40 terdapat peningkatan sebesar 35.36%.
- c) Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mempunyai sasaran tertunjangnya urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DPKP). Formula perhitungan indikator ini adalah penjumlahan bobot 5 (lima) komponen penilaian oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu: a. Perencanaan kinerja (26.53); b. Pengukuran Kinerja (20.31); c. Pelaporan Kinerja (11.14); d. Evaluasi Kinerja (5.95); dan e. Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (15.83) maka didapat nilai 79.77. Capaian indikator kinerja adalah 99.23% dari target tahun 2022

yaitu 80.39. Dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 79.17 terdapat peningkatan sebesar 0.75%.

- b. Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Internal. Formula perhitungan indikator ini adalah rata-rata nilai survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap 4 (Empat) aspek, yaitu: a. Pelayanan keuangan (74.06); b. Pelayanan kepegawaian (73.68); c. Pelayanan umum (69.14); dan d. Penyediaan jasa penunjang (70.63) maka didapat nilai rata-rata sebesar 71.88 dengan kategori “Memuaskan”. Capaian indikator kinerja adalah 84.56% dari target tahun 2022 yaitu 85. Dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 61.02 terdapat peningkatan sebesar 15.11%.

Tabel III.17
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
(Sasaran 5)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai good governance. Nilai aspek pemenuhan (12.09) + Nilai aspek reform (19.68) = 31.76 lalu dibagi nilai bobot maksimal (36.30) x 100. Maka didapat angka capaian sebesar 87.49.</p>	73.42	87.49	119.16%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Gambar III.5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (Sasaran 5)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Rapat Pimpinan Rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022.</p>
2.		<p>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan narasumber dari BKPSDMD dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
3.		<p>Penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan Internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>

4.		<p style="text-align: center;">Musyawah Perencanaan Pembangunan Pertanian (MUSRENBANG-TAN) Tahun 2023</p>
----	--	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi sektoral dan lintas sektor yang kondusif sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. Ketersediaan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- e. Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa penunjang;
- f. Dukungan anggaran untuk Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi COVID-19 disertai pembatasan aktivitas kegiatan pada awal tahun 2022, sehingga frekuensi kegiatan lewat tatap muka/langsung berkurang;
- b. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- c. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di Minggu ke IV bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- d. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru serta penyetaraan jabatan struktural (Eselon IV) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	7 Ton/ha	6.79 Ton/Ha	97%	Rp7,365,306,639	Rp6,972,261,240	94.66%	Rp393,045,399
2	Peningkatan populasi peternakan.	Populasi Peternakan	19.789.207	15.709.946	79.38%	Rp12,087,634,650	Rp1,062,112,377	8.79%	Rp11,025,522,273
3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	98	86.1	87.86%	Rp522,319,656	Rp437,686,300	83.80%	Rp84,633,356
4	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	98	81.1	82.76%	Rp257,718,351	Rp248,644,254	96.48%	Rp9,074,097
5	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	73.42	87.49	119.16%	Rp36,581,438,745	Rp35,135,192,184	96.05%	Rp1,446,246,561
Total Belanja						Rp56,814,418,041	Rp43,855,896,355	77.19%	Rp12,958,521,686

Sumber : <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022

Berdasarkan tabel III.18 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2022 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 56,814,418,041,- terealisasi Rp 43,855,896,355,- atau 77.19% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 12,958,521,686,- atau 22.81% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honor narasumber;
- Efisiensi sewa tempat;
- Efisiensi biaya makanan dan minuman;
- Serta alokasi dana DID Tahap II (Pengadaan Bibit Ternak Sapi) sebanyak 550 ekor dengan Pagu sebesar Rp 11.005.000.000,- yang tidak dapat terealisasi dikarenakan waktu lelang/pengadaan tidak memadai (DDPA baru terbit bulan Desember 2022), serta sulitnya mendapatkan pemasok dan ketersediaan sapi yang sesuai dengan spesifikasi kegiatan berdasarkan jumlah dan waktu yang ditentukan, sehingga Kegiatan Tersebut Digulirkan pada APBD Mendahului Perubahan TA 2023.

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Penggunaan Aplikasi *WhatsApp Group* (WAG), untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data mengenai perkembangan/progress, hambatan, kendala, serta tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan

- kegiatan lingkup OPD;
- b. Pemanfaatan aplikasi *Google Drive* sebagai media penyimpanan data sebagai bentuk efisiensi penggunaan kertas dan digitalisasi Arsip OPD;
 - c. Pemanfaatan aplikasi *Google Form* sebagai media pengumpulan data yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi;
 - d. Penggunaan aplikasi digital seperti *Zoom Meeting* dan *Google Meet* dalam rapat koordinasi, bimbingan teknis, serta sosialisasi.

3.4. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan penilaian terbaik terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2022 oleh KPPN Pangkalpinang, tanggal 30 Agustus 2022.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

2. Partisipasi Tata Kelola Data Sektorial Terbaik I Penerapan Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 5 Desember 2022.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

- Provinsi Terbaik V Pengolahan Statistik Pertanian Komoditas Hortikultura oleh Kementerian Pertanian (KEMENTAN) Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2022.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2022

BAB IV

Penutup

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan Kinerja*

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah:

1. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non produktif, alih profesi petani, serta kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas pertanian;
2. Penambahan kasus penyakit hewan menular pada hewan ternak, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun potong paksa. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah pemasukan hewan ke Provinsi Bangka Belitung akibat pembatasan lalu lintas hewan;
3. Menurunnya produksi komoditas pertanian dan yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, tingginya kebutuhan pangan pokok tidak dapat diakomodir oleh pangan produksi lokal sehingga menyebabkan terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada hari raya keagamaan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal yang dianjurkan sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun keseimbangan gizinya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

program dan kegiatan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

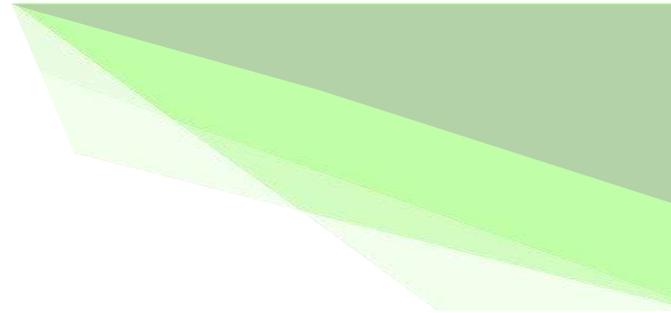
1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara Coffee Morning serta Apel Pagi sebelum memulai aktifitas kantor secara rutin.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada petani terkait penyesuaian jadwal tanam dengan musim tanam, serta edukasi/pendekatan kepada petani agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan menjadi lahan tambang;
2. Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
3. Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K);
4. Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan, serta meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian;
5. Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas dengan melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke petani;
6. Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal

khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.

7. Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP).
8. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari keselarasan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Pembangunan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	5	6	6	7	7
		Peningkatan populasi peternakan	Populasi Peternakan	11.661.566	13.001.547	14.955.680	17203518	19.789.207
2	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	98	98	98	98	98
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	98	98	98	98	98
3	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	73.34	73.36	73.38	73.4	73.42

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

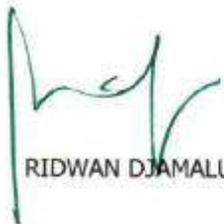
Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2022

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung</p> <div style="text-align: center;"> RIDWAN DJAMALUDDIN</div>	<p style="text-align: center;">Pihak Pertama</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <div style="text-align: center;"> EDI ROMDHONI, S.P., M.M. Pembina Tk. I NIP. 19701116 199303 1 005</div>
--	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	7	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan populasi peternakan	Populasi peternakan	19.789.207	Jumlah ternak yang hidup pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	98	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman ketersediaan pangan di masyarakat
4.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	98	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat
5.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	73.42	Nilai yang didapatkan DPKP sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 886.158.833	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 250.926.032	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 700.017.145	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 39.999.723	APBD

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 6.351.098.106	APBD
2.	Populasi peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 219.741.450	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 92.466.298	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 56.891.689	APBD
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 450.088.523	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 180.591.497	APBD
5.	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 36.581.438.745	APBD

Pihak Kedua
Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung


RIDWAN DJAMALUDDIN

Pangkalpinang, November 2022
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19701116 199303 1 005

Lampiran 3. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021**

NOMOR : 700/121/LHE/INPTD/2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BELITUNG, KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 480313 FAX 434693

Pangkalpinang, 28 April 2022

Nomor : 700/ 121 /LHE/INPTD/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di -
Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun evaluasi dilakukan dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem SAKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai sebesar **79.77** dengan kategori **BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang Andal)**.

Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,53
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,14
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,95
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,83
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100	79,77
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

4. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan Kinerja**
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian atas Implementasi Perencanaan Kinerja yaitu Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
 - Pengukuran Kinerja**
Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atas Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran Kinerja yaitu:
 - Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
 - Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya;
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 - Pelaporan Kinerja**
Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atas Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja yaitu:
 - Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang memadai;
 - Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan sesuai dengan kriteria;
 - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
 - Evaluasi Kinerja**
Hasil penilaian terhadap evaluasi kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat hal-

hal yang perlu mendapat perhatian atas Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 2. Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja belum dilaksanakan secara optimal;
 3. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 4. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode;
 5. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Hasil evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu masih terdapat target kinerja yang belum tercapai.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Melakukan monitoring pencapaian target dalam rencana aksi secara periodik;
 - b. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
 - c. Melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV;
 - d. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 - e. Melakukan revisi terhadap laporan kinerja yaitu menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
 - f. Memanfaatkan Informasi kinerja yang disajikan untuk perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja;
 - a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja;
 - b. Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan periodik minimal triwulanan dan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang;
 - c. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan menjadi lebih baik dari tahun ketahun.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, *RB*


SUSANTO
Pembina/Utama Madya
NIP. 196306121985031001

Tembusan:

- Menteri PAN dan RB;
- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Dinas/Badan/Kantor : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Periode Evaluasi : LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENILAIAN	NILAI	CATATAN
1.	2.	3.	4.	5.
I. PERENCANAAN PERENCANAAN KINERJA (10%)				
			88,40%	8,84
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)			87,81%	8,78
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)			100,00%	2,00
1	Renstra SKPD telah disusun	Y/T	Y	1
2	Renstra telah memuat tujuan	Y/T	Y	1
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A/B/C/D/E	A	1
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A/B/C/D/E	A	1
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y/T	Y	1
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A/B/C/D/E	A	1
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A/B/C/D/E	A	1
8	Renstra telah menyajikan IKU	A/B/C/D/E	A	1
9	Renstra telah dipublikasikan	Y/T	Y	1
b. KUALITAS RENSTRA (5%)			90,63%	4,53
10	Tujuan telah berorientasi hasil	KKE2 (E71)	A	1
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	KKE3 (F156)	A	1
12	Sasaran telah berorientasi hasil	KKE2 (H71)	A	1
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	KKE4 (F310)	A	1
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A/B/C/D/E	A	1
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	A/B/C/D/E	B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	A/B/C/D/E	B	0,75
17	Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	A/B/C/D/E	B	0,75
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)			75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan	A/B/C/D/E	B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	A/B/C/D/E	B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	A/B/C/D/E	B	0,75
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)				
			88,75%	17,75
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)			100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y/T	Y	1
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y/T	Y	1
3	PK telah menyajikan IKU	A/B/C/D/E	A	1
4	PK telah dipublikasikan	Y/T	Y	1
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)			92,50%	9,25
5	Sasaran telah berorientasi hasil	KKE2 (J71)	A	1
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	KKE4 (H310)	A	1
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A/B/C/D/E	B	0,75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A/B/C/D/E	A	1
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A/B/C/D/E	A	1
10	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra	A/B/C/D/E	B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A/B/C/D/E	B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y/T	Y	1
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A/B/C/D/E	A	1

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENILAIAN	NILAI	CATATAN	
1	2	3	4	5	
14	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y/T	Y	1	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN			75,00%	4,50	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y/T	Y	1	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	A/B/C/D/E	B	0,75	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	A/B/C/D/E	C	0,5	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	A/B/C/D/E	B	0,75	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	A/B/C/D/E	B	0,75	
B. PENCAPAIAN HASIL & UTM			81,25%	40,63	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y/T	Y	1	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A/B/C/D/E	A	1	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A/B/C/D/E	A	1	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y/T	Y	1	
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			87,50%	10,94	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	KKES	A	1	
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja	KKES (L157)	A	1	
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A/B/C/D/E	A	1	
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A/B/C/D/E	A	1	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	A/B/C/D/E	A	1	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	A/B/C/D/E	A	1	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	A/B/C/D/E	A	1	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	A/B/C/D/E	B	0,75	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y/T	Y	1	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y/T	T	0	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			58,33%	4,38	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	A/B/C/D/E	B	0,75	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	A/B/C	B	0,5	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	A/B/C/D/E	C	0,5	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>	A/B/C/D/E	C	0,5	
19	IKU telah <i>direvisi secara berkala</i>	A/B/C/D/E	B	0,75	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	A/B/C	B	0,5	
IV. PELAPORAN HASIL & UTM			100,00%	3,00	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y/T	Y	1	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y/T	Y	1	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y/T	Y	1	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A/B/C/D/E	A	1	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)			72,57%	5,44	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tahun 2022

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENILAIAN	NILAI	CATATAN
1	2	3	4	5
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	A/B/C/D/E	A	1
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjankan	A/B/C/D/E	A	1
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A/B/C/D/E	B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	A/B/C/D/E	B	0,75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A/B/C/D	C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	A/B/C/D/E	B	0,75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	A/B/C/D/E	C	0,5
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)			60,00%	2,70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y/T	Y	1
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	A/B/C/D/E	C	0,5
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	A/B/C/D/E	C	0,5
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	A/B/C/D/E	C	0,5
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	A/B/C/D/E	C	0,5
IV. JAWAB (20%)			76,40%	4,96
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)			85,50%	1,71
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Y/T	Y	1
2	Evaluasi program telah dilakukan	Y/T	Y	1
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A/B/C/D	B	0,67
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	A/B/C/D/E	B	0,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)			54,71%	2,74
5	Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	A/B/C/D/E	B	0,75
6	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	A/B/C/D/E	B	0,75
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0,5
8	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0,5
9	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	A/B/C/D/E	C	0,5
10	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0,5
11	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	A/B/C/D	C	0,33
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)			50,00%	1,50
12	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	A/B/C/D/E	C	0,5

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENILAIAN	NILAI	CATATAN	
1	2	3	4	5	
13	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	A/B/C/D/E	C	0,5	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)			83,33%	8,33	
1	Target dapat dicapai	A/B/C/D/E	B	0,75	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A/B/C/D/E	B	0,75	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	A/B/C/D/E	A	1	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)			75,00%	7,50	
4	Target dapat dicapai	KKE1		0,50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	KKE1		0,65	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	KKE1		1,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				79,77	

Pangkalpinang,

direvisi oleh,
PENGENDALI TEKNIS

SERIWATI, S.P

disusun oleh,
TIM EVALUATOR

1. Ketua Tim
2. Anggota Tim
3. Anggota Tim
4. Anggota Tim
5. Anggota Tim

: SRI WAHYUNI, S.E.
: YUNIE ANASTASIA, S.E.
: RISVAN IKMAL F, S.IP.
: LUKMAN, S.E.
: NOVI KURNIATI, S.H.

Lampiran 4. Tindak Lanjut Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (volume)	Keadaan saat ini	Bukti Pendukung	Jadwal Tentatif Pelaksanaan					
						Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Melakukan monitoring pencapaian target dalam rencana aksi secara periodik	Rapat monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6 kali	Rapat intern (coffee morning) hanya dihadiri oleh eselon III	Notulen hasil rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1	1	1	1	1	1
2	Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Penggunaan aplikasi bit/ly dalam peninputan laporan monitoring dan evaluasi	6 kali	Pengumpulan data dan update data realisasi kinerja masih dilakukan secara manual dengan mengim form realisasi kinerja	Form bit.ly yang telah terintegrasi	1	1	1	1	1	1
3	Melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV	Monitoring pencapaian target kinerja Eselon III dan IV disampaikan melalui Laporan Dalev per Triwulan	2 Dokumen	Laporan Dalev telah memuat pencapaian target kinerja eselon III dan IV	Laporan Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) OPD			1			1
4	Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Pemberian piagam penghargaan dari kepala dinas kepada eselon yang meraih capaian kinerja yang paling baik pada tahun anggaran tersebut dan peringatan secara tertulis dari kepala dinas kepada eselon yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	1 kali	Reward dan punishment terhadap capaian kinerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum diberikan	Piagam penghargaan dan peringatan tertulis						1
5	Melakukan revisi terhadap laporan kinerja yaitu menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Menyajikan tabel informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya OPD	1 Dokumen	Informasi analisis efisiensi OPD belum disajikan dengan baik	Dokumen tabel informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya OPD						1
6	Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan untuk perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan dan penilaian kinerja	Pemanfaatan informasi kinerja dalam rapat penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah	1 Dokumen	Pemanfaatan informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan dan penilaian kinerja	Dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah						1
7	Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja	Kepala dinas melakukan pengawasan internal serta penilaian secara berkala terhadap seluruh jajarannya dalam rangka pengendalian kinerja	6 kali	Pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja belum dilakukan setiap bulan	Dokumen hasil pengawasan dan penilaian kinerja	1	1	1	1	1	1
8	Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan dilakukan minimal triwulan dan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang	Melaksanakan rapat internal per Triwulan yang melibatkan seluruh PPK/PPTK lingkup OPD dalam rangka penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) guna membahas pencapaian target dan realisasi, serta rencana aksi	2 Kali	Pelaksanaan Rapat Internal per Triwulan belum melibatkan seluruh PPK/PPTK	Notulen hasil Rapat Internal per Triwulan			1			1
9	Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun	Penyusunan Dokumen Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian oleh setiap PPK/PPTK berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka peningkatan capaian kinerja	1 Dokumen	Pemetaan Risiko Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian belum dilakukan oleh seluruh PPK/PPTK	Dokumen Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian OPD	1					

Keterangan: Rekomendasi : Diisi sesuai dengan LHP SAKIP PD TH 2021
 RATL : Diisi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan atas rekomen
 Target : Diisi dengan volume pelaksanaan tindak lanjut
 Keadaan Saat ini : Diisi dengan keadaan saat ini sebagai data awal
 Bukti Pendukung : Diisi dengan dokumen pendukung yang dihasilkan atas pelaksanaan

Kepala Dinas
 Pertanian dan Ketahanan Pangan

EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
 19701116 199303 1 005

Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

NO.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	TARGET KINERJA	SATUAN	TARGET			
						TW : 1	TW : 2	TW : 3	TW : 4
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam	7	Ton/Ha	7	7	7	7
2	Peningkatan populasi peternakan	Populasi Peternakan	Jumlah temak yang hidup pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan target pada laporan ini adalah 1 (satu) tahun.	19,789,207	Ekor	13,789,207	15,789,207	17,789,207	19,789,207
3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman ketersediaan pangan di masyarakat	98	Skor	-	-	-	98
4	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat	98	Skor	-	-	-	98
5	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.	73.42	Skor	-	-	-	73.42

Kepala Dinas
 Pertanian dan Ketahanan Pangan



EDI ROMCHONI, S.P., M.M.
 NIP. 1970116 199303 1 005

SUBKODOR PERENCANAAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **2022**